

dan 1990-an isu kinerja pemerintah daerah telah menjadi bahan diskusi ilmiah yang relevan hingga saat ini (Hansen, 2023; Santolini, 2020; dan Piña & Avellaneda, 2019). Isu ini masih menjadi topik yang *debatable* karena dicirikan multi-layanan, sehingga dapat dipersepsikan berbeda oleh berbagai pemangku kepentingan (Milán-García et al., 2022; Avellaneda et al., 2022; Blank & Niaounakis, 2021; Andrews et al., 2021; Caldas et al., 2020; Leiser & Mills, 2019; dan Vignieri, 2018).

Para ahli sektor publik, seperti Hansen (2023); Fasiello et al. (2022); Vignieri (2018); Walker & Andrews (2015); Maurel et al. (2014); dan Summermatter & Siegel (2009) memberi pendapat bahwa kinerja pada sektor publik meliputi 3E (faktor ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan IOO (*input, output, outcome*). Literatur terkini menganjurkan fokus studi pemerintah daerah pada isu kinerja *outcome*, karena sejalan dengan semangat prinsip *New Public Management* (Walton, 2020; Korac et al., 2020; dan Mas et al., 2019). Pada konteks ini, kinerja *outcome* diartikan sebagai konsekuensi atau dampak atau manfaat dari kinerja *input* dan kinerja *output* (Fasiello et al., 2022 dan Summermatter & Siegel, 2009).

Indeks pembangunan manusia (IPM) dipandang sebagai proksi kinerja *outcome* yang memiliki perspektif lebih komprehensif, karena terdiri dari pendapatan, pendidikan, dan kesehatan (Anderson & Gerber, 2017) dan telah diadopsi secara luas (Shi & Tang, 2020). Penelitian ini mengeksplorasi dan menginvestigasi kinerja *outcome* dengan ukuran IPM pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menarik untuk diinvestigasi karena memiliki keunggulan atau potensi atas akses sumber daya yang dapat mendorong peningkatan IPM pemerintah daerah (Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023). Potensi tersebut yaitu : 1). Potensi atas akses ekonomi sebagai jalur distribusi barang dan jasa diantara dua titik pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, antara Jakarta – Surabaya. 2) Potensi atas akses infrastruktur yang memadai, seperti jalan nasional ($\pm 1.518,09$ km), bandara (6 bandara), pelabuhan (14 pelabuhan), kereta api (1.680,26 km dengan 115 stasiun), dan jalan tol (330,71 km). 3). Potensi atas demografi yaitu jumlah penduduk yang besar sejumlah 37,892 juta pada tahun 2024 yang tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota. 4). Memiliki kesamaan karakteristik yaitu fungsi layanan dan kesamaan geografis.

Menurut Sarkodie & Adams (2020) dan Rodríguez-pose & Tselios (2019); Arimah (2017); dan Dasic et al. (2020) bahwa daerah yang memiliki keunggulan atas akses potensi sumber daya, infrastruktur, dan demografi dapat mendorong kinerja. Begitupun proposisi ilmiah menyatakan bahwa pemerintah daerah yang memiliki potensi atas akses sumber daya dan kesamaan karakteristik fungsi dan geografi seharusnya memiliki capaian kinerja yang setara (Donatella & Bisogno, 2024; Anderson & Gerber, 2023; dan Jabbour et al., 2020). Namun demikian, dari 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa terdapat ketidaksetaraan capaian kinerja IPM. Berdasarkan *range* yang ditetapkan oleh PBB, yaitu : 1) sebesar 22,86% kabupaten dengan capaian kinerjanya dalam kategori menengah, 2) sebesar 60% kabupaten dan 5,71% kota dalam kategori tinggi, dan 3) sebesar 11,43% kota kategori sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada ketimpangan capaian kinerja IPM pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Fenomena tersebut seharusnya mendapat perhatian yang serius bagi pemerintah daerah, sebab pencapaian kinerja dapat berfungsi sebagai tolok ukur bagi pemerintah daerah (Campo et al., 2021 dan Fusco & Allegrini, 2020). Pendapat Liu et al. (2021) memperkuat hal ini bahwa pemerintah daerah yang capaian kinerjanya buruk akan mendapat tekanan dari berbagai pihak. Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang didorong oleh tekanan dari berbagai pihak atau pemangku kepentingan sejalan dengan isomorfisme teori institusional (Rozario & Issa, 2020; Nguyen, 2019; Piña & Avellaneda 2018; dan DiMaggio & Powell, 1983). Publik akan menuntut layanan publik yang setara dengan pemerintah daerah lain (Cordery & Hay, 2022; dan Piña & Avellaneda, 2018).

Menurut Mudzusi et al. (2024) tata kelola menjadi salah satu faktor penting sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan kinerja pemerintah daerah. Tata kelola diartikan sebagai hubungan antar peserta (pemangku kepentingan) yang saling memengaruhi (OECD Principles of Corporate Governance, 1999; 2004; 2015). Sementara tata kelola sektor publik didefinisikan sebagai konsep multifaset (berbagai segi), mencakup semua aspek : keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembuatan, implementasi kebijakan atau pelaksanaan kewenangan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya negara melalui lembaga formal dan informal (Mishra & Attri, 2020 dan Panday & Chowdhury, 2020). Tata kelola pemerintah daerah meliputi beberapa elemen, antara lain akuntabilitas, responsibilitas, daya tanggap, efektivitas, transparansi, supremasi hukum, keterlibatan publik, dan kesetaraan yang cermin dalam capaian kinerja (Mudzusi et al., 2024; Androniceanu 2021; Campo et al., 2021; Erkkilä, 2020; dan Maksimovska & Stojkov, 2019). Menurut Munzhedzi (2021); Power (2015); Miller et al. (2008); Goddard

(2005); dan Lowe & Doolin (1999) elemen – elemen tata kelola dapat tercipta melalui instrumen sistem akuntansi sebagai salah satu faktor pendukung organisasi publik.

Salah satu keterlibatan pemangku kepentingan dalam mekanisme tata kelola pemerintah daerah diinvestigasi dengan proksi audit internal (Vadasi et al., 2020 dan Coetzee & Erasmus, 2017). Menurut Österberg & de Fine Licht (2023); dan Lenz et al. (2018) audit internal (IA) menjadi pilar utama tata kelola seperti akuntabilitas dan transparansi. Audit internal menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintah daerah karena perannya yaitu sebagai salah satu mekanisme pengendalian internal yang beroperasi setiap hari secara efektif dalam meningkatkan layanan publik (Cordery & Hay, 2022; Kotb et al., 2020; Burdon & Sorour, 2020; dan Vadasi et al., 2020). Di Indonesia, audit internal termasuk internal pemerintah daerah, namun dalam menjalankan fungsinya independen dan objektif karena dibawah BPKP yang diatur dengan regulasi (White et al., 2020; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 72 Tahun 2019; dan Permendagri No. 18 Tahun 2020; dan Perpres No. 192 tahun 2014).

Peran audit internal dirasakan penting sebagai alat untuk meningkatkan kinerja *outcome* di pada sektor publik (Österberg & de Fine Licht, 2023 dan Funk & Owen, 2020). Beberapa penelitian telah membuktikannya, antara lain : Appiah et al. (2023); Edmonds et al. (2023); Österberg & de Fine Licht (2023); dan Rich et al. (2021). Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa audit internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara Dzomira (2020) memberikan hasil penelitian yang berbeda yaitu audit internal tidak efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan masih terdapat kesenjangan peranan audit internal sebagai prediktor dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Kesenjangan hasil temuan penelitian membuka peluang untuk mengeksplor kembali audit internal pemerintah daerah. Kesenjangan tersebut menjadi acuan untuk menetapkan audit internal sebagai variabel prediktor dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini memasukan variabel kontrol yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, yaitu aset pemerintah daerah (Gao et al., 2021; Oates, 2016; dan Laswad et al., 2005) dan penduduk (Rahman, 2022; Muraoka & Avellaneda, 2021; Krah & Mertens, 2020; Keerasuntonpong et al., 2017; Avellaneda & Gomes, 2015).

Telaah studi terdahulu memperlihatkan ada inkonsistensi temuan yang memotivasi dilakukannya penyelidikan lebih lanjut. Motivasi utama penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dengan menyelidiki faktor tata kelola melalui audit internal dan mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola di pemerintah daerah. Sesuai dengan pendapat Fayissa & Nsiah (2013) hasil temuan yang saling bertentangan menandakan perlunya penelitian lebih lanjut di area (tema) ini. Menurut Hermuningsih et al. (2020) dan Larcker et al. (2007) salah satu kemungkinan alasan hasil yang tidak konsisten disebabkan perbedaan proksi yang digunakan saat mengukur variabel penelitian sangat sederhana. Motivasi penting lainnya mengusulkan proksi audit internal dengan indikator jumlah auditor internal sebagai kebaruan (*novelty*) penelitian yang dapat berkontribusi dalam literatur. Indikator ini masih sedikit dieksplor dalam konteks pengaruh tata kelola terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama penelitian di Indonesia.

Penelitian ini membatasi permasalahan dengan rumusan apakah audit internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?. Sementara tujuan penelitian ini yaitu membuktikan pengaruh audit internal terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pengembangan Hipotesis

Teori Institusional

Pada konteks organisasi sektor publik, teori institusional menjadi acuan terbanyak untuk menjelaskan struktur dan perubahan suatu organisasi (Ahyaruddin & Akbar, 2018). Keerasuntonpong & Cordery (2018) menyatakan bahwa teori institusional sangat relevan dengan studi sektor publik. Adapun teori institusional didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang dilembagakan yang khas untuk menjelaskan keberadaan dan/atau elaborasi struktur organisasi (Scott, 1987). Menurut Deephouse (1996); Kondra & Hinings (1998); Purcell et al. (2014) dan Ashworth et al. (2009) teori institusional merupakan lingkungan organisasi yang dicirikan oleh elaborasi aturan dan persyaratan organisasi yang secara individu harus sesuai, jika ingin menerima dukungan dan legitimasi. Belle et al. (2019); Piña & Avellaneda (2018); (DiMaggio & Powell, 1983) dan Meyer & Rowan (1977) menegaskan bahwa organisasi dapat menjadi isomorfisme karena tekanan institusional ((institutional isomorphism). Isomorfisme dapat terjadi melalui : 1) isomorfisme koersif yang berasal dari pengaruh politik dan masalah legitimasi; 2) isomorfisme

mimetik yang dihasilkan dari respons standar terhadap ketidakpastian; dan 3) isomorfisme normatif, terkait dengan profesionalisme

Penetapan menggunakan teori institusional dengan argumen bahwa teori institusional dicirikan dengan lingkungan eksternal yang berada diluar kendali organisasi, tetapi dapat memengaruhi kinerja organisasi (Tran & Villano, 2019; Narbón-Perpiñá & De Witte, 2018; Kondra & Hinings, 1998; Ashworth et al., 2009; dan Sharfman & Dean, 1991). Menurut Nugrahani et al. (2023) organisasi saling memengaruhi untuk menyerupai satu sama lainnya dalam bentuk dan praktiknya di lingkungan yang sejenis. Teori ini sejalan dengan mekanisme tata kelola pada pemerintah daerah yang terkait erat dengan lingkungan eksternal dalam berbagai proses dan hubungan (Boas et al., 2018). Tata kelola dipandang sebagai mekanisme pemantau dari pemangku kepentingan yang berada diluar organisasi (Halme & Huse, 1997). Pada penelitian ini lingkungan eksternal diobservasi dengan mekanisme eksternal, antara lain : DPRD, audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, dan predikat pemerintah daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Campo et al. (2021) kinerja pemerintah menjadi sorotan masyarakat dalam memberikan layanan yang lebih baik. Begitupun kinerja pemerintah daerah tidak lepas menjadi perhatian utama dari para ahli sektor publik (Hue & Sun, 2022 dan Lohrey et al., 2019). Di Eropa, masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah daerah melalui kinerjanya (Bjørnå & Weigård, 2020). Kemudian Kessner (2022) menjelaskan bahwa kinerja sebagai salah satu bidang kebijakan yang sangat cocok untuk komunikasi strategis pada pemerintah daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, meliputi output dan outcome.

Tata Kelola dan Kinerja Pemerintah Daerah

OECD Principles of Corporate Governance (1999; 2004; 2015) memberikan definisi bahwa tata kelola merupakan hubungan antar peserta (pemangku kepentingan) dalam sistem tata kelola yang saling memengaruhi. Sementara pada sektor publik, Mishra & Attri (2020); Keping (2018) mendefinisikan tata kelola sektor publik sebagai konsep multifaset (berbagai segi), mencakup semua aspek pelaksanaan kewenangan, melalui lembaga formal dan informal, dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya negara.

Penerapan tata kelola pada sektor publik seperti pemerintah daerah bahwa tata kelola dipandang sebagai jawaban untuk mengatasi kompleksitas pemerintahan dan menyediakan berbagai praktik yang bermanfaat untuk memperluas kapasitas penyampaian layanan publik (Stanica & Aristigueta, 2019). Menurut Vyasulu (2015) penerapan praktik tata kelola telah dilihat sebagai syarat yang diperlukan bagi suatu negara untuk pertumbuhan ekonomi, menyediakan layanan penting dan mengurangi kemiskinan. Trommel (2020) menjelaskan secara realitas penerapan tata kelola sebagai cita-cita normatif untuk organisasi sektor publik dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang berorientasi pada hasil (outcome). Almquist et al. (2013) memberi catatan bahwa berbagai usaha pembenahan mekanisme tata kelola terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja di sektor publik menuju pemerintahan yang modern

Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

The Chartered Institute of Internal Auditors (CIIA) mendefinisikan audit internal yaitu aktivitas konsultasi dan asurans (keandalan informasi) yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kinerja organisasi (Rosa et al., 2014). Sementara audit internal pada pemerintah daerah sesuai dengan Code of Practice CIPFA didefinisikan sebagai fungsi jaminan yang memberikan pendapat independen dan objektif kepada organisasi tentang lingkungan pengendalian dengan mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan organisasi (White et al., 2020).

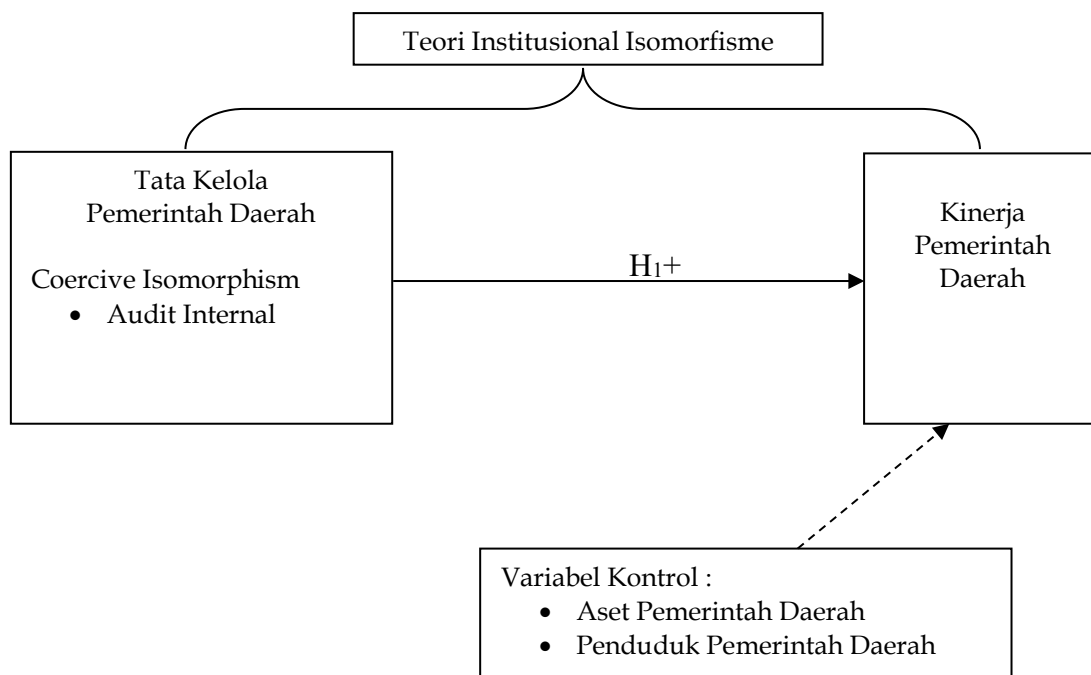
Audit internal merupakan pilar utama tata kelola melalui pemantauan akuntansi dan keuangan, operasional, dan manajemen risiko (Vadasi et al., 2020; Lenz et al., 2018; Ferry et al., 2017; dan Arena & Jeppesen, 2016). Pada pemerintah daerah, audit internal yaitu sebagai landasan tata kelola dan jantung akuntabilitas administrasi publik (Aikins, 2013). Peran audit internal dalam tata kelola di pemerintah daerah adalah untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya keuangan dengan mengidentifikasi pemborosan, inefisiensi dan penipuan dalam item anggaran (Alqudah et al., 2019; Ferry et al., 2017; dan

Aikins, 2011). Menurut Österberg & de Fine Licht, 2023; Postula et al. (2020); Ferry et al. (2017); Asiedu & Deffor, 2017; Ackermann et al., 2016; Ahmad (2015); Arena (2013); dan Aikins (2012) peran audit internal dalam tata kelola memiliki potensi untuk memperkuat kontrol, memastikan keandalan informasi, mencegah penipun, penasehat independen, melindungi aset, akuntabilitas, dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemangku kepentingan.

Fungsi pengawasan audit internal pada pemerintah daerah mengacu pada serangkaian standar, proses, dan struktur yang ditetapkan oleh regulasi (Turetken et al., 2020). Pada pemerintah daerah, regulasi terkait audit internal mengatur juga ketersediaan sumber daya (Abdelrahim & Al-Malkawi, 2022). Menurut Ferry et al. (2017) dan Wicaksono & Sutaryo (2017) kecukupan auditor menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja pemerintah daerah. George et al. (2020) dan DiMaggio & Powell (1983) menyatakan bahwa dukungan regulasi mengenai fungsi audit internal dan ketersediaan auditor internal mencerminkan teori institusional dari sisi tekanan koersif, sehingga kinerja pemerintah daerah cenderung isomorfisme. Argumen-argumen di atas dapat diartikan bahwa semakin banyak auditor internal, semakin kuat daya kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_1 = Auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

Kerangka Penelitian



Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Pada penelitian ini generalisasi secara empiris dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah yang memiliki karakteristik yang sama yaitu fungsi pelayanan. Hasil dari kinerja layanan pemerintah daerah dimanifestasikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun tata kelola pemerintah daerah diidentifikasi dengan dewan perwakilan rakyat (DPRD), audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, dan predikat. Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling) dengan jumlah 35

pemerintah daerah yang terdiri dari dua puluh sembilan kabupaten dan enam kota dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1 Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Deskripsi	Operasional	Peneliti Terdahulu	
Variabel dependen :					
1	Kinerja pemerintah daerah	Tindakan dan hasil (outcome) dari program yang telah dicapai pemerintah daerah kabupaten dan kota	Proksi Pembangunan Manusia kabupaten dan kota	Indeks (IPM)	Tripathi (2021); Sarpong & Bein (2021); dan Sarkodie & Adams (2020).
No.	Variabel	Deskripsi	Operasional	Peneliti Terdahulu	
Variabel independen :					
2	Coercive Audit Isomorphism internal	Fungsi pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan objektif atas efektivitas kinerja organisasi yang diatur dengan regulasi	Proksi jumlah auditor internal pemerintah daerah dan kota	Appiah et al. (2023), Edmonds et al. (2023), Österberg & de Fine Licht (2023), Rich et al. (2021)	
No.	Variabel Bebas	Deskripsi	Operasional	Peneliti Terdahulu	
3	Variabel kontrol a. Aset pemerintah daerah	a. Jumlah asset pemerintah daerah	a. Jumlah asset pemerintah daerah	Gao et al. (2021); Oates (2016); Rahman (2022) dan Laswad et al. (2005)	
	b. Penduduk pemerintah daerah	b. Kepadatan penduduk pemerintah daerah	b. Kepadatan penduduk pemerintah daerah	Muraoka & Avellaneda (2021); Krah & Mertens (2020); Keerasuntonpong et al. (2017); dan Avellaneda & Gomes, (2015)	

Model data panel digunakan pada penelitian ini dengan model regresi linear tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0it + \beta_{1it}X_{it} + \beta_{2it}Z_{1it} + \beta_{3it}Z_{2it} + \epsilon_{it}$$

Dimana :

$i = 1,2,3, \dots$, banyaknya unit cross section

$t = 1,2,3, \dots$, banyaknya data time series

Y_{it} = Kinerja pemerintah daerah ke-it

X_{it} = Audit internal ke-it

Z_{1it} = Variabel kontrol aset pemerintah daerah ke-it

Z_{2it} = Variabel kontrol kepadatan penduduk daerah ke-it

β = parameter yang dietimasi

ϵ_{it} = Unsur gangguan populasi

Pengujian Pemilihan Estimasi Model Data Panel dilakukan secara bertahap, antara lain Uji Chow untuk memilih estimasi model regresi data panel antara common effects model dengan fixed effects model (Schwarz & Dalmácio, 2021 dan Sriyana, 2014). Uji Lagrange Multiplier (Uji LM - Uji Breusch-Pagan) untuk memilih estimasi model regresi data panel antara common effects model dengan random

effects model (Schwarz & Dalmácio, 2021; Sriyana, 2014; Baltagi, 2005; dan Greene, 2003). Pengujian ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Breusch & Pagan (1980) dengan menyusun uji lagrange multiplier atau uji LM (Baltagi, 2005 dan Greene, 2003) dan uji Hausman untuk menentukan estimasi model mana yang lebih baik, antara fixed effects model dengan random effects model (Schwarz & Dalmácio, 2021; Gujarati & Porter, 2009 dan Greene, 2003).

Uji asumsi klasik digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS). Pada penelitian ini hanya menggunakan uji asumsi klasik uji Heteroskedastisitas. Metode uji statistik heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Breusch-Pagan-Godfrey. Menurut uji Breusch-Pagan-Godfrey, heteroskedastisitas terdeteksi dalam estimasi model regresi apabila nilai $Obs^*R\text{-Squared} > \chi^2\text{-tabel}$ ($\chi^2\text{-tabel}$) dan nilai probabilitas $Obs^*R\text{-Squared} < 0,05$, begitu sebaliknya. Heteroskedastisitas tidak terdeteksi apabila nilai $Obs^*R\text{-Squared} < \chi^2\text{-tabel}$ ($\chi^2\text{-tabel}$) dan nilai probabilitas $Obs^*R\text{-Squared} > 0,05$. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis yaitu audit internal dapat memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara hipotesis statistik yang diajukan :

$H_a : \beta \neq 0$ Yaitu audit internal memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria, jika nilai $p\text{-value} \geq \alpha 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini artinya audit internal tidak memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Jika nilai $p\text{-value} < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini artinya audit internal memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif menggunakan alat bantu eviews v.13 dapat melalui common sample. Hasil pengujian statistik deskriptif dengan common sample disajikan dalam Tabel 1.2

Tabel 2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Common sample

	IPM	Jml Auditor Internal	Jumlah Aset Pemda	Jumlah Kepadatan Penduduk
Mean	72,40	17,91	4,72	1.941,875
Maximum	84,43	44,00	24,10	11.878
Minimum	64,86	5,00	1,10	450
Std. Dev.	4,26	7,84	3,39	2283.939
Observations	176	176	176	176

Sumber : Data yang diolah, 2024.

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa data sampel kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 – 2023 sejumlah 176 data sampel atau 71,84% data sampel dari 245 data sampel yang seharusnya tersedia. Capaian kinerja tertinggi 84,43 diraih oleh Kota Semarang pada tahun 2023, sementara capaian kinerja terendah 64,86 dipegang oleh Kabupaten Brebes pada tahun 2017. Capaian kinerja pemerintah daerah menunjukkan rata – rata 72,40 dengan simpangan baku (standar deviasi) sebesar 4,26. Audit internal pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan ukuran jumlah auditor internal. Uji statistik deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan common sample. Sejumlah 176 data sampel atau 71,84% terverifikasi dari 245 data sampel yang seharusnya ada. Jumlah tersebut tervalidasi untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan standar deviasi 7,84 atau 44,07%.

Hasil analisis statistik deskriptif variabel kontrol dapat dilihat pada Tabel V.2. Pendekatan common sample digunakan untuk analisis statistik deskriptif. Jumlah asset pemerintah daerah dan jumlah kepadatan penduduk diamati untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023 seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data sampel tercatat sejumlah 176 data sampel atau 71,84% dari 245 data sampel yang seharusnya teridentifikasi. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa standar deviasi jumlah asset pemerintah daerah sebesar 3,39 yang dikategorikan dengan sebaran besar dan standar deviasi jumlah kepadatan penduduk sebesar 2.283,94 yang dikategorikan dengan sebaran sangat besar. jumlah asset pemerintah daerah dan jumlah kepadatan penduduk kabupaten dan

kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata – rata nilai 4,72 dan 1.941,88. Jumlah asset pemerintah daerah tertinggi 24,1 ditempati Kota Semarang dan jumlah kepadatan penduduk tertinggi 11.879 ditempati oleh Kota Surakarta. Jumlah asset pemerintah daerah terendah diduduki oleh Kabupaten Rembang sebesar 1,10 dan jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah terendah diduduki oleh Kabupaten Blora sebesar 450.

Pengujian Pemilihan Estimasi Model Data Panel

Uji Chow

Keputusan pemilihan model dapat dilihat pada Tabel 3 dengan melihat tingkat probabilitas.

Tabel 3 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	75,13	(34,16)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	558,89	34	0,0000

Nilai probabilitas (p-value) untuk kedua pengujian, baik Cross-section F-test maupun Cross-section Chi-square, adalah 0.0000, atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Keputusan yang diambil menggunakan fixed effect model (FEM) sebagai model yang dianggap pilihan tepat.

Uji Lagrange multiplier (Uji LM – Uji Breusch-Pagan)

Hal uji menunjukkan bahwa estimasi model data panel yang tepat adalah *Random Effect Model* (REM) karena nilai probabilitas < 0,05.

Tabel. 4 Hasil Uji Lagrange multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	<i>Test Hypothesis</i>		
	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
Breusch-Pagan	279,7641 (0,0000)	0,379660 (0,5378)	280.1438 (0,0000)

Hasil pengujian menunjukkan cross-section sebesar 0,0000, time sebesar 0,5378, dan both sebesar 0,0000. Secara keseluruhan nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 0,05.

Uji Hausman

Hasil uji Hausman menunjukkan tingkat probabilitas 0,8466 > 0,05, sehingga estimasi model regresi data panel yang dianggap tepat adalah *Random Effects Model* (REM).

Tabel 5 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	0.811854	3	0,8466

hasil uji Hausman dengan tingkat probabilitas > 0,05. Hasil ini mengarahkan pada keputusan untuk memilih estimasi model regresi data panel yang dianggap lebih tepat. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan akan menerima H_0 , jika tingkat probabilitas > 0,05, begitupun sebaliknya.

Pengujian Goodness of Fit Suatu Model Regresi

Nilai koefisien determinasi pada model regresi dapat diketahui melalui nilai R-squared.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Weighted Statistics

R-squared	0,431968	Mean dependent var	7,875587
Adjusted R-squared	0,423138	S.D. dependent var	1,727196
S.E. of regression	0,750705	Sum squared resid	108,7666
F-statistic	48,92319	Durbin-Watson stat	0,858837
Prob(F-statistic)	0,000000		

Nilai koefisien determinasi R-squared sebesar 0,431968 termasuk moderat. Hal ini dapat dipahami bahwa variabel independen dalam estimasi model regresi mampu menjelaskan variasi variabel dependen dengan baik. Nilai koefisien determinasi R-squared tersebut memenuhi kriteria *goodness of fit*, sehingga hasil analisis dianggap valid dan dapat diandalkan dan dapat dijadikan landasan interpretasi hasil penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini menyatakan bahwa apabila nilai $\text{Obs}^*\text{R-Squared} > \chi^2_{\text{tabel}}$ (χ^2_{tabel}) dan nilai probabilitas $\text{Obs}^*\text{R-Squared} < 0,05$, begitu sebaliknya. Heteroskedastisitas tidak terdeteksi apabila nilai $\text{Obs}^*\text{R-Squared} < \chi^2_{\text{tabel}}$ (χ^2_{tabel}) dan nilai probabilitas $\text{Obs}^*\text{R-Squared} > 0,05$ (Ekananda, 2019; Ghozali & Ratmono, 2017; dan Suliyanto, 2011).

Tabel .7 Hasil Uji Breusch-Pagan-Godfrey

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1,745753	Prob. F(3,193)	0,1590
Obs*R-squared	5,204573	Prob. Chi-Square(3)	0,1574
Scaled explained SS	13,13327	Prob. Chi-Square(3)	0,0044

Hasil uji Breusch-Pagan-Godfrey dengan nilai $\text{Obs}^*\text{R-squared}$ sebesar 5,204573 dan nilai Prob. sebesar 0,1574. Hasil uji menunjukkan nilai $\text{Obs}^*\text{R-squared}$ (5,204573) $< \chi^2_{\text{tabel}}$ (9,488) dan Prob. (0,1574) $> 0,05$. Berdasarkan hasil uji Breusch-Pagan-Godfrey, estimasi model regresi tidak terindikasi gejala heteroskedastisitas. Penjelasan hasil uji dan interpretasinya memberi bukti bahwa estimasi model regresi yang dibangun sudah sesuai dengan kriteria BLUE.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian Estimasi Regresi Random Effects Model (REM). Tabel V.29. menyajikan prediksi hipotesis, koefisien regresi, nilai signifikansi, dan keputusan. Tabel ini menjadi landasan pembahasan dan interpretasi temuan penelitian.

Tabel 8 Hasil Uji Estimasi Model Regresi (*Random Effects Model/REM*).

Dependent Variable: Kinerja Outcome : IPM
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 03/12/26 Time: 11:06
Sample: 2017 2023
Periods included: 7
Cross-sections included: 35
Total panel (unbalanced) observations: 197

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Prediksi	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Keputusan
C		67,3399	98,6966	0,0000	
Audit Internal pemda kab./kota	+	0,1028	8,6282	0,0000	Diterima
Jumlah Aset pemda kab./kota	+	3,0500	4,9865	0,0000	Diterima
Kepadatan Penduduk pemda kab./kota	+	0,0010	5,7315	0,0000	Diterima

Keterangan : Variabel Dependen yaitu IPM; ***highly significant < 0,01; **significant < 0,05; * moderately significant < 0,10.

Pembahasan

Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hipotesis yang diajukan adalah audit internal yang diukur dengan jumlah auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil pengujian hipotesis diterima secara statistik karena nilai probabilitas (*p-value*) untuk variabel audit internal sebesar $0,0000 < 0,05$ pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian menandakan kriteria hipotesis dapat diterima secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti audit internal yang diukur dengan jumlah auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengaruh signifikan positif. Hasil pengujian ini diartikan bahwa audit internal yang diukur dengan jumlah auditor pemerintah daerah semakin meningkat, maka kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) semakin meningkat. Secara empiris, penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa audit internal pemerintah daerah berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian Appiah et al. (2023) yang menjelaskan bahwa audit internal dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Ghana. Begitupun Edmonds et al. (2023) membuktikan bahwa kelemahan audit internal dapat meningkatkan biaya utang pemerintah daerah. Rich et al. (2021) menunjukkan bukti bahwa perubahan auditor dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Österberg & de Fine Licht (2023) menyatakan keberadaan audit internal dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Hasil pengujian audit internal berpengaruh positif signifikan mencerminkan pemilihan dan penetapan variabel audit internal dengan ukuran jumlah auditor pemerintah daerah sebagai manifestasi tata kelola pemerintahan sejalan dengan teori yang digunakan. Bukti menunjukkan bahwa audit internal pemerintah daerah sebagai pilar utama mekanisme tata kelola yang didukung regulasi (UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 72 Tahun 2019; dan Permendagri No. 18 Tahun 2020) konsisten dengan teori institusional. Secara konseptual, mekanisme tata kelola dengan dukungan regulasi merefleksikan kekuatan koersif bagi audit internal untuk melakukan tekanan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa fungsi pengawasan oleh audit internal berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan jumlah auditor internal sampai memenuhi standar minimal rasio jumlah pegawai pemerintah daerah. Jumlah auditor internal yang belum mencukupi berisiko tidak efektif dan menghambat capaian kinerja. Tetapi jumlah auditor yang berlebihan mungkin membuat aktivitas audit internal tidak efisien (Sutaryo et al., 2023; Ferry et al., 2017; dan Wicaksono & Sutaryo, 2017).

Variabel kontrol

Penelitian ini menyertakan variabel kontrol untuk mempertahankan hasil penelitian. Variabel kontrol dimasukkan dalam penelitian ini untuk menjaga ketelitian dan kehati-hatian atas konsistensi hasil penelitian. Dua variabel kontrol yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu jumlah aset pemerintah daerah dan jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah. Pandangan menggunakan jumlah aset sebagai variabel kontrol bahwa aset yang besar berpeluang dalam menciptakan kinerja yang tinggi (Altaf & Ahmad, 2019). Jumlah aset memungkinkan dapat mengendalikan efek eksternal yang tidak diteliti (Cohen & Malkogianni, 2021).

Tabel V.29. mencatat bahwa variabel kontrol jumlah aset positif signifikan pada tingkat 0,05 secara statistik. Pengujian variabel kontrol jumlah aset memberikan hasil sesuai yang diharapkan bahwa jumlah aset dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian ini mendapat dukungan dari Ferreira (2020) yaitu variabel kontrol dengan ukuran jumlah aset dapat memengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah di Portugal. Begitupun variabel kontrol jumlah aset pemerintah daerah yang diobservasi Suprianto & Salim (2024) mencatat bahwa jumlah aset meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa jumlah aset pemerintah daerah dapat melindungi variabel utama dari pengaruh luar dengan efektif, sehingga hasil pengujian relatif konsisten validitasnya.

Selain itu, hasil pengujian ini memberikan pemahaman bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah memanfaatkan dengan baik jumlah aset yang besar untuk meningkatkan kinerjanya (Laswad et al., 2005).

Variabel kontrol berikutnya yaitu jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Literatur mencatat bahwa penduduk pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja (Wang & Chen, 2022; Tran et al., 2019; Avellaneda & Gomes, 2015; dan Drew et al., 2014). Menurut Jiang et al. (2025) seiring meningkatnya kepadatan penduduk, kebutuhan akan layanan juga meningkat. Hasil pengujian variabel kontrol kepadatan penduduk sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pengujian yang ditunjukkan dalam Tabel 4.29. menginformasikan variabel kontrol kepadatan penduduk positif signifikan secara statistik. Hasil pengujian variabel kontrol ini bermanfaat sebagai informasi bahwa kepadatan penduduk sudah dikelola dengan baik, sehingga berimplikasi pada kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa teori institusional isomorfisme mampu menjelaskan peranan mekanisme tata kelola dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Kinerja pemerintah daerah ini didorong agar serupa (isomorfisme) oleh mekanisme koersif. Kinerja pemerintah daerah diinvestigasi dengan kinerja outcome, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara mekanisme tata kelola dalam penelitian ini diobservasi dengan proksi audit internal, proksi audit internal sebagai cerminan isomorfisme koersif memberikan fakta empiris bahwa audit internal mampu memprediksi hasil estimasi. Audit internal yang dilengkapi dengan peraturan sebagai implementasi mekanisme tata kelola berperan mengawasi jalannya pemerintah daerah. Peran audit internal sebagai kekuatan koersif yang diukur dengan jumlah auditor pemerintah daerah mampu mendorong kesetaraan capaian kinerja IPM pemerintah daerah.

Penulis menyakini bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini diharapkan diperbaiki oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan penelitian ini yang harus ditindaklanjuti bagi peneliti selanjutnya, antara lain : Banyak data yang tidak tersedia (missing link data) baik online maupun offline, sehingga jumlah data yang seharusnya 245 observasi, hanya tersedia 176 observasi atau 71,8% selama periode tahun 2017 - 2023 pada 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk data rapat DPRD dan jumlah auditor internal pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pendekatan pada pemerintah daerah untuk mendapatkan data sesuai dengan yang direncanakan apabila tidak tersedia secara online, terutama untuk penelitian yang menggunakan data panel lebih dari lima tahun. Penelitian ini hanya mengobservasi dari sisi kuantitas, yaitu jumlah auditor internal, sehingga belum mencerminkan kualitas auditor. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan kualitas auditor, seperti pendidikan, pengalaman, dan level sertifikasi

Referensi

- Abdelrahim, A., & Al-Malkawi, H. A. N. (2022). The Influential Factors of Internal Audit Effectiveness: A Conceptual Model. *International Journal of Financial Studies*, 10(3), 1-23.
- Abdullah, H., & Tursoy, T. (2021). Capital structure and firm performance: evidence of Germany under IFRS adoption. *Review of Managerial Science*, 15(2), 379-398.
- Abouassi, K., & Bies, A. (2017). Relationships and resources : the isomorphism of nonprofit organizations ' (NPO) self-regulation. *Public Management Review*, 00(00), 1-21.
- Ackermann, C., Marx, B., & Fourie, H. (2016). Internal audit disclosures in annual reports of metropolitan municipalities in South Africa. *Journal of Governance and Regulation*, 5(1), 43-50.
- Ahmad, H. N. (2015). Internal Audit (IA) Effectiveness : Resource-Based and Institutional Perspectives. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 9(9), 95-104.
- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 1-11.

- Aikins, S. K. (2011). An examination of government internal audits' role in improving financial performance. *Public Finance and Management*, 11(4), 306.
- Aikins, S. K. (2012). Determinants of auditee adoption of audit recommendations: Local government auditors' perspectives. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 24(2), 195–220.
- Aikins, S. K. (2013). Government Internal Audits: The Determinants of Quality Supervisory Review of Audit Documentation. *International Journal of Public Administration*, 36(10), 673–685.
- Akbar, R., Pilcher, R. A., & Perrin, B. (2015). Implementing performance measurement systems Indonesian local government under pressure. In *Qualitative Research in Accounting & Management* (Vol. 12, Issue 1).
- Al-Najjar, B., & Abed, S. (2014). The association between disclosure of forward-looking information and corporate governance mechanisms: Evidence from the UK before the financial crisis period. *Managerial Auditing Journal*, 29(7), 578–595.
- Almqvist, R., Grossi, G., van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). Public sector governance and accountability. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(7–8), 479–487.
- Alqudah, H. M., Amran, N. A., & Hassan, H. (2019). Factors affecting the internal auditors' effectiveness in the Jordanian public sector. *EuroMed Journal of Business*, 14(3), 251–273.
- Altaf, N., & Ahmad, F. (2019). Working capital financing, firm performance and financial constraints: Empirical evidence from India. *International Journal of Managerial Finance*, 15(4), 464–477.
- Amaral, E., Inácio, H., Araújo, F. De, Almeida, V. De, Duque, H., Paola, S., Garizado, A., Lilian, R., Carrillo, A., Elizabeth, R., Jaramillo, A., Julieth, L., & Lopez, G. (2021). Dimensions of Local Development in the Colombian Pacific Region. *Regional Science Policy & Practice*, 13(14), 1348–1370.
- Anderson, J. B., & Gerber, J. (2017). The US-Mexico Border Human Development Index, 1990–2010. *Journal of Borderlands Studies*, 32(3), 275–288.
- Anderson, J. B., & Gerber, J. (2023). The US-Mexico Border Human Development Index, 1990–2015: Improvements but Still Large Gaps. *Journal of Borderlands Studies*, 38(1), 1–20.
- Andrews, R., Bellò, B., Downe, J., Martin, S., & Walker, R. M. (2021). The Motivations for the Adoption of Management Innovation by Local Governments and its Performance Effects. *Public Administration Review*, 81(4), 625–637.
- Andrews, R., Entwistle, T., & Guarneros-Meza, V. (2019). Local Government Size and Political Efficacy: Do Citizen Panels Make a Difference? *International Journal of Public Administration*, 42(8), 664–676.
- Androniceanu, A. (2021). Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. *Administratie Si Management Public*, 2021(36), 149–164.
- Arena, M. (2013). Internal Audit in Italian Universities: An Empirical Study. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 93, 2000–2005.
- Arena, M., & Jeppesen, K. K. (2016). Practice Variation in Public Sector Internal Auditing: An Institutional Analysis. *European Accounting Review*, 25(2), 319–345.
- Arifin, J. (2014). *Isomorphic Pressures Influencing the Level of Mandatory Disclosure within Financial Statements of Indonesian Local Governments* (Issue November).
- Arifin, J. (2022). View of Determinants of the effectiveness of audit procedures in revealing fraud: An attribution theory approach. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(6), 378–387.
- Arifin, J., Tower, G., & Porter, S. (2015). Financial reporting compliance in Indonesian local governments: Mimetic pressure dominates. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 68–84.
- Arimah, B. (2017). *Infrastructure as a Catalyst for the Prosperity of African Cities*. 198(September 2016), 245–266.
- Ashworth, R., Boyne, G., & Delbridge, R. (2009). Escape from the iron cage? Organizational change and isomorphic pressures in the public sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(1), 165–187.
- Asiedu, K. F., & Deffor, E. W. (2017). Fighting Corruption by Means of Effective Internal Audit Function: Evidence from the Ghanaian Public Sector. *International Journal of Auditing*, 21(1), 82–99.
- Avellaneda, C. N. (2012). Do Politics or Mayors' Demographics Matter for Municipal Revenue Expansion? *Public Management Review*, 14(8), 1061–1086.
- Avellaneda, C. N., Bello-Gomez, R. A., & Gomes, R. C. (2022). Municipal Fiscal Performance: Mayors'

- Gender and Organizational Human Resources. *Journal of Policy Studies*, 37(3), 1–25.
- Avellaneda, C. N., & Gomes, R. C. (2015). Is small beautiful? Testing the direct and nonlinear effects of size on municipal performance. *Public Administration Review*, 75(1), 137–149.
- Avellaneda, C. N., & Gomes, R. C. (2017). Mayoral quality and municipal performance in Brazilian local governments. *Organizações & Sociedade*, 24(83), 555–579.
- Awan, A. M., Azam, M., Saeed, I. U., & Bakhtyar, B. (2020). Does globalization and financial sector development affect environmental quality? A panel data investigation for the Middle East and North African countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(36), 45405–45418.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric analysis of panel data – 3rd ed* (Third edit). John Wiley & Sons Ltd.
- Baltagi, B., & Liu, L. (2020). *Forecasting with Unbalanced Panel Data* (Issue 221).
- Barrett, P. (2002). Achieving better practice corporate governance in the public sector. *Australian National Audit Office*, June.
- Belle, N., Belardinelli, P., Cantarelli, P., & Mele, V. (2019). on Iron Cages and Suboptimal Choices: an Experimental Test of the Micro-Foundations of Isomorphism in the Public Sector. *International Public Management Journal*, 22(2), 373–414.
- Benito, B., Guillamón, M. D., & Ríos, A. M. (2021). Transparency and efficient management in local governments. *Cities*, 115(March), 1–5.
- Bessire, D. (1999). Détruire la performance. *Comptabilité Contrôle Audit*, 127–150.
- Bjørnå, H., & Weigård, J. (2020). From Public to Private Accountability in Norwegian Local Government. *SAGE Open*, 10(3).
- Blank, J. L. T., & Niaounakis, T. K. (2021). Economies of Scale and Sustainability in Local Government : A Complex Issue. *Sustainability*, 13(23), 1–10.
- Boas, I., Kloppenburg, S., van Leeuwen, J., & Lamers, M. (2018). Studying Global Environmental Meetings. *Global Environmental Politics*, 18(4), 107–126.
- Bourguignon, A. (1997). Sous les pavés la plage? ou les multiples fonctions du vocabulaire comptable : l'exemple de la performance. *Comptabilité - Contrôle - Audit*, 3(1), 89.
- Brumback, G. B. (1988). Some Ideas, Issues and Predictions about Performance Management. *Public Personnel Management*, 17(4), 387–402.
- Bullock, E. L., Woodcock, C. E., & Holden, C. E. (2020). Improved change monitoring using an ensemble of time series algorithms. *Remote Sensing of Environment*, 238(April 2019), 1–17.
- Burdon, W. M., & Sorour, M. K. (2020). Institutional Theory and Evolution of 'A Legitimate' Compliance Culture: The Case of the UK Financial Service Sector. In *Journal of Business Ethics* (Vol. 162, Issue 1). Springer Netherlands.
- Cadbury, A. (1993). The Report of the Cadbury Committee on The Financial Aspects of Corporate Governance: The Code of Best Practice. *Corporate Governance: An International Review*, 1(3), 124–124.
- Caldas, P., Dollery, B., & Marques, R. C. (2020). Measuring what matters in local government: a Municipality Sustainability Index. *Policy Studies*, 0(0), 1–21.
- Campbell, J. P., & Wiernik, B. M. (2015). The Modeling and Assessment of Work Performance. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 2, 47–74.
- Casteel, A., & Bridier, N. L. (2021). Describing Populations and Samples in Doctoral. *International Journal of Doctoral Studies*, 16, 339–362.
- Chiappetta Jabbour, C. J., Seuring, S., Lopes de Sousa Jabbour, A. B., Jugend, D., De Camargo Fiorini, P., Latan, H., & Izeppi, W. C. (2020). Stakeholders, innovative business models for the circular economy and sustainable performance of firms in an emerging economy facing institutional voids. *Journal of Environmental Management*, 264(1), 1–12.
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. In *Modern Methods For Business Research* (Issue JANUARY 1998, pp. 295–336).
- Clatworthy, M. A., Mellett, H. J., & Peel, M. J. (2000). Corporate governance under "New Public Management": An exemplification. *Corporate Governance: An International Review*, 8(2), 166–176.
- Coetzee, P., & Erasmus, L. J. (2017). What drives and measures public sector internal audit effectiveness? Dependent and independent variables. *International Journal of Auditing*, 21(3), 237–248.
- Cohen, L., Manion, L., & Keith, M. (2007). *Research Methods in Education - Sixth edition* (Sixth edit). Routledge.
- Cohen, S., & Malkogianni, I. (2021). Sustainability measures and earnings management : evidence from

- Greek municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(4), 365–386.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business research methods - Twelfth edition* (Twelfth ed). McGraw-Hill/Irwin.
- Cordery, C. J., & Hay, D. C. (2022). Public sector audit in uncertain times. *Financial Accountability and Management*, 38(3), 426–446.
- Coste, A.-I., & Tudor, A. T. (2013). Service Performance - Between Measurement and Information in the Public Sector. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 92, 215–219.
- Da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & De Sousa, L. (2016). Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866–893.
- Dacin, M. T., Goodstein, J., & Scott, W. R. (2002). Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum. *Academy of Management Journal*, 45(1), 45–57.
- Dal Mas, F., Massaro, M., Lombardi, R., & Garlatti, A. (2019). From output to outcome measures in the public sector: a structured literature review. In *International Journal of Organizational Analysis* (Vol. 27, Issue 5, pp. 1631–1656).
- Dasic, B., Devic, Z., Denic, N., Zlatkovic, D., Ilic, I. D., Cao, Y., Jermisittiparsert, K., & Le, H. Van. (2020). Human development index in a context of human development : Review on the western Balkans countries. *Brain and Behavior*, 10(9), 1–12.
- De Benedictis-Kessner, J. (2022). Strategic government communication about performance. *Political Science Research and Methods*, 10(3), 601–616.
- Deephouse, D. L. (1996). Does isomorphism legitimate? *Academy of Management Journal*, 39(4), 1024–1039.
- del Campo, C., Hermosa del Vasto, P., Urquía-Grande, E., & Jorge, S. (2021). Country Performance in the South American Region: A Multivariate Analysis. *International Journal of Public Administration*, 44(5), 390–408.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Donatella, P., & Bisogno, M. (2024). Determinants of popular financial reporting: Evidence from Swedish municipalities. *Journal of Public Affairs*, 24(1), 1–12.
- Drew, J., Kortt, M. A., & Dollery, B. (2014). Economies of Scale and Local Government Expenditure: Evidence From Australia. *Administration and Society*, 46(6), 632–653.
- Dubnick, M. (2005). *Accountability and the Promise of Performance : In Search of the Mechanisms*. 28(3), 376–417.
- Dybkaer, R. (2011). Definitions of “measurement.” *Accreditation and Quality Assurance*, 16(10), 479–482.
- Dzomira, S. (2020). Corporate Governance and Performance of Audit Committee and Internal Audit Functions in an Emerging Economy’s Public Sector. *Indian Journal of Corporate Governance*, 13(1), 85–98.
- Edmonds, C. T., Leece, R. D., Vermeer, B. Y., & Vermeer, T. E. (2023). The role of adverse outcomes in municipal debt costs. *Advances in Accounting*, 63(February), 100671.
- Ek Österberg, E., & de Fine Licht, J. (2023). Beyond auditor and auditee: exploring the governance of performance in eldercare. *Public Management Review*, 25(1), 84–103.
- Ekananda, M. (2019). *Ekonometrika Dasar : Untuk Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Bisnis Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Elena-Iuliana, I., & Maria, C. (2016). Organizational Performance – a Concept That Self-Seeks To Find Itself. *Analele Universității Constantin Brâncuși Din Târgu Jiu : Seria Economie*, 4, 179–183.
- Erkkilä, T. (2020). Transparency in Public Administration. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, May, 1–21.
- Fasiello, R., Rivenbark, W. C., & Bianchi, C. (2022). Exploring the Shift from Output Measures to Outcome Measures of Service Delivery: Insights from Municipal Research. *Public Performance and Management Review*, 45(2), 428–447.
- Fayissa, B., & Nsiah, C. (2013). The Impact Of Governance On Economic Growth In Africa. *The Journal of Developing Areas*, 47(1), 91–108.
- Febriyanti, D., Widianingsih, I., Sumaryana, A., & Buchari, R. A. (2024). The typology and determinant of performance measurement for public sector organizations—a literature review. *Cogent Business and Management*, 11(1), 1–20.
- Feng, Y., Hassan, A., & Elamer, A. A. (2020). Corporate governance, ownership structure and capital

- structure: evidence from Chinese real estate listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 28(4), 759–783.
- Ferreira, A. (2020). Political competition as a motivation for earnings management close to zero : the case of Portuguese municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(3), 461–485.
- Ferry, L., Zakaria, Z., Zakaria, Z., & Slack, R. (2017). Watchdogs, helpers or protectors? – Internal auditing in Malaysian Local Government. *Accounting Forum*, 41(4), 375–389.
- Foged, S. K. (2016). The Relationship Between Population Size and Contracting Out Public Services: Evidence from a Quasi-experiment in Danish Municipalities. In *Urban Affairs Review* (Vol. 52, Issue 3).
- Frumkin, P., & Galaskiewicz, J. (2004). Institutional isomorphism and public sector organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 14(3), 283–307.
- Funk, K. D., & Owen, E. (2020). Consequences of an Anti-Corruption Experiment for Local Government Performance in Brazil. *Journal of Policy Analysis and Management*, 39(2), 444–468.
- Fusco, E., & Allegrini, V. (2020). The role of spatial interdependence in local government cost efficiency: An application to waste Italian sector. *Socio-Economic Planning Sciences*, 69(January), 100681.
- Gao, H., Ru, H., & Yongjun, D. (2021). Subnational debt of China: The politics-finance nexus. *Journal of Financial Economics*, xxxx.
- George, B., Baekgaard, M., Decramer, A., Audenaert, M., & Goeminne, S. (2020). Institutional isomorphism, negativity bias and performance information use by politicians: A survey experiment. *Public Administration*, 98(1), 14–28.
- George, D. E. R. (1996). Performance epistemology. *Performance Research*, 1(1), 16–25.
- Ghalem, Â., Okar, C., Chroqui, R., & Semma, E. (2016). *Performance : A concept to define ! La performance : Un concept à définir !* May, 1–12.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10 Edisi 2*. Badan Penerbit Undip.
- Goddard, A. (2005). Reform as regulation – accounting, governance and accountability in UK local government. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 1(1), 27–44.
- Gomes, R. C., Alfinito, S., & Albuquerque, P. H. M. (2013). Analyzing local government financial performance: evidence from Brazilian municipalities 2005-2008. *Revista de Administração Contemporânea*, 17(6), 704–719.
- Gomes, R. C., Lisboa, E., & Osborne, S. (2021). Local government decisions in resource allocation: what is stakeholders' role in the process. *Academy of Management Proceedings*, 2021(1), 10324.
- Greene, W. H. (2003). *Econometric Analysis - Fifth Edition* (Fifth Edit). Pearson Education, Inc.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics - 5th ed* (Fifth Edit). McGraw-Hill/Irwin.
- Haddad, A., El Ammari, A., & Bouri, A. (2021). Impact of Audit Committee Quality on the Financial Performance of Conventional and Islamic Banks. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(4), 1–24.
- Halme, M., & Huse, M. (1997). The influence of corporate governance, industry and country factors on environmental reporting. *Scandinavian Journal of Management*, 13(2), 137–157.
- Hansen, J. A. (2023). Does performance information receive political attention? *Public Administration Review*, 83(4), 763–774.
- Hansen, S. W. (2015). The democratic costs of size: How increasing size affects citizen satisfaction with local government. *Political Studies*, 63(2), 373–389.
- Hay, D. C., & Cordery, C. J. (2021). The future of auditing research in the public sector. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(2), 234–242.
- Hermuningsih, S., Kusuma, H., & Cahyarifida, R. A. (2020). Corporate Governance and Firm Performance: An Empirical Study from Indonesian Manufacturing Firms. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 827–834.
- Hue, T. H. H., & Tung-Wen Sun, M. (2022). Democratic Governance: Examining the Influence of Citizen Participation on Local Government Performance in Vietnam. *International Journal of Public Administration*, 45(1), 4–22.
- Hyndman, N., & McKillop, D. (2019). Accounting for the Public Sector at a Time of Crisis. *Abacus*, 55(3), 437–451.
- Janse van Rensburg, J. O., & Coetzee, P. (2016). Internal audit public sector capability: A case study. *Journal*

- of *Public Affairs*, 16(2), 181–191.
- Ji, X. D., Ahmed, K., & Lu, W. (2015). The impact of corporate governance and ownership structure reforms on earnings quality in China. *International Journal of Accounting and Information Management*, 23(2), 169–198.
- Jiang, X., Xu, J., Cheng, F., Zuo, X., Wang, D., Yin, W., Cui, L., Xie, F., Wang, L., Artem, B., Tian, G., & Kang, Z. (2025). Does population density impact maternal and child health? Mediating effects of the Universal Health Coverage Service Coverage Index. *BMC Public Health*, 25(2002), 1–13.
- Jones, G., & Beattie, C. (2015). Local government internal audit compliance. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 9(3), 59–71.
- Karikari Appiah, M., Amaning, N., Tettevi, P. K., Frimpong Owusu, D., & Opoku Ware, E. (2023). Internal audit effectiveness as a boon to public procurement performance: a multi mediation model. *Cogent Economics and Finance*, 11(1), 1–19.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246.
- Keerasuntonpong, P., & Cordery, C. (2018). How might normative and mimetic pressures improve local government service performance reporting? *Accounting and Finance*, 58(4), 1169–1200.
- Keerasuntonpong, P., Dunstan, K., & Khanna, B. (2017). Factors influencing disclosures of statements of service performance of New Zealand local authorities. *Pacific Accounting Review*, 27(3), 304–328.
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1).
- Khalid, A. M., Sharma, S., & Dubey, A. K. (2021). Concerns of developing countries and the sustainable development goals: case for India. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 28(4), 303–315.
- Kılıç, A., Akdamar, E., Göğebakan, M., & Bastug, S. (2023). Effect of Logistics Performance Index on Human Development Index: An Application to Logistics Sector. *Transactions on Maritime Science*, 12(1), 1–21.
- Kondra, A. Z., & Hinings, C. R. (1998). Organizational diversity and change in institutional theory. *Organization Studies*, 19(5), 743–767.
- Korac, S., Saliterer, I., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2020). Contrasting and explaining purposeful and legitimizing uses of performance information: a mayor's perspective. *Public Management Review*, 22(4), 553–577.
- Korac, S., Saliterer, I., & Walker, R. M. (2017). Analysing the environmental antecedents of innovation adoption among politicians and public managers. *Public Management Review*, 19(4), 566–587.
- Kotb, A., Elbardan, H., & Halabi, H. (2020). Mapping of internal audit research: a post-Enron structured literature review. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(8), 1969–1996.
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods & Techniques*. New Age International Limited.
- Krah, R., & Mertens, G. (2020). Democracy and financial transparency of local governments in Sub-Saharan Africa. *Meditari Accountancy Research*, 28(4), 681–699.
- Krichene, A., & Baklouti, E. (2020). Internal audit quality: perceptions of Tunisian internal auditors an explanatory research. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(1), 28–54.
- Kusuma, H., Muafi, M., Aji, H. M., & Pamungkas, S. (2020). Information and Communication Technology Adoption in Small- and Medium-Sized Enterprises: Demographic Characteristics. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 969–980.
- Larcker, D. F., Richardson, S. A., & Tuna, I. (2007). Corporate Governance, Accounting Outcomes, and Organizational Performance. *The Accounting Review*, 82(4), 963–1008.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121.
- Leiser, S., & Mills, S. (2019). Local Government Fiscal Health: Comparing Self-Assessments to Conventional Measures. *Public Budgeting and Finance*, 39(3), 75–96.
- Lelly, K. C., & Afiah, N. N. (2017). Does quality of financial statement affected by internal control system and internal audit? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 568–573.
- Lenz, R., Sarens, G., & Jeppesen, K. K. (2018). In Search of a Measure of Effectiveness for Internal Audit Functions: An Institutional Perspective. *Edpacs*, 58(2), 1–36.
- Libman, A. (2012). Democracy, size of bureaucracy, and economic growth: Evidence from Russian regions. *Empirical Economics*, 43(3), 1321–1352.

- Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2012). *Statistical techniques in business & economics -15th ed.* (Fifteenth). McGraw-Hill/Irwin.
- Liu, L., Yang, Z., & Song, S. (2021). Does ranking stimulate government performance? Evidence from China's key environmental protection cities. *Social Indicators Research*, 158(2), 699–725.
- Lohrey, R. C., Horner, C. A., Williams, B. R., & Wilmshurst, T. D. (2019). Coming to grips with corporate governance in local government. *Australian Journal of Public Administration*, 78(4), 596–612.
- Lowe, A., & Doolin, B. (1999). *Lowe and Doolin(1999)MAR casemix accounting in NZ.pdf*. May, 181–201.
- Luo, W., Zheng, W., & Long, Y. (2023). Relational Work and its Pitfalls: Nonprofits' Participation in Government-Sponsored Voluntary Accreditation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 3(1), 63–79.
- Madanoglu, M., & Karadag, E. (2016). International Journal of Contemporary Hospitality Management Corporate governance provisions and firm financial performance: the moderating effect of deviation from optimal franchising. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 28(8), 1–36.
- Mahmudah, H., & Riyanto, B. L. (2017). Keefektifan Audit Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 33.
- Majeed, M. T., & Ozturk, I. (2020). Environmental degradation and population health outcomes: a global panel data analysis. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(13), 15901–15911.
- Maksimovska, A., & Stojkov, A. (2019). Composite Indicator of Social Responsiveness of Local Governments: An Empirical Mapping of the Networked Community Governance Paradigm. *Social Indicators Research*, 144(2), 669–706.
- Maurel, C., Carassus, D., Favoreu, C., & Gardey, D. (2014). Characterization and definition of public performance: an application to local government authorities. *Gestion et Management Public*, 2/n°3(1), 23.
- Meyer, D. F. (2018). Predictors of good governance and effective government management: The case of poland. *Polish Journal of Management Studies*, 18(1), 206–217.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Milán-García, J., Rueda-López, N., & De Pablo-Valenciano, J. (2022). Local government efficiency: reviewing determinants and setting new trends. *International Transactions in Operational Research*, 29(5), 2871–2898.
- Miller, P., Kurunmäki, L., & O'Leary, T. (2008). Accounting, hybrids and the management of risk. *Accounting, Organizations and Society*, 33(7–8), 942–967.
- Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2023). Human development and decentralization The importance of public health expenditure. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(1), 191–219.
- Mishra, J., & Attri, V. (2020). Governance, Public Service Delivery and Trust in Government. *Studies in Indian Politics*, 8(2), 186–202.
- Mudzusi, T. N., Munzhedzi, P. H., & Mahole, E. (2024). Governance challenges in the provision of municipal services: in the Vhembe District Municipality. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 12(1), 1–11.
- Munzhedzi, P. H. (2021). An evaluation of the application of the new public management principles in the South African municipalities. *Journal of Public Affairs*, 21(1).
- Muraoka, T., & Avellaneda, C. N. (2021). Do the networks of inter-municipal cooperation enhance local government performance? *Local Government Studies*, 47(4), 616–636.
- Narbón-Perpiñá, I., & De Witte, K. (2018). Local governments' efficiency: a systematic literature review – part II. *International Transactions in Operational Research*, 25(4), 1107–1136.
- Neely, A., Adams, C., & Kennerley, M. (2002). *The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success*. Prentice-Hall Financial Times.
- Nerantzidis, M., Pazarskis, M., Drogalas, G., & Galanis, S. (2022). Internal auditing in the public sector: a systematic literature review and future research agenda. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(2), 189–209.
- Nguyen, B. (2019). Entrepreneurial Reinvestment: Local Governance, Ownership, and Financing Matter – Evidence from Vietnam. *Journal of Small Business Management*, 57(S2), 323–349.

- Nugrahani, T. S., Kusuma, H., Arifin, J., & Muhammad, R. (2023). International Journal of Sustainable Development and Planning Determinants of Sustainability Report Quality in Indonesian Public Companies : An Isomorphism Theory Approach. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(12), 3909–3921.
- Oates, G. (2016). *Is voluntary disclosure of environmental performance associated with actual environmental performance ? Evidence from Victorian local governments , Australia*. 6563(June). OECD principles of corporate governance. (1999).
- Ozdogan, S., Yildizbasi, A., & Rouyendegh, B. D. (2020). Performance evaluation of municipal services with fuzzy multi-criteria decision making approaches: a case study from Turkey. *SN Applied Sciences*, 2(6).
- Palmer, A. J. (1993). Performance measurement in local government. *Public Money and Management*, 13(4), 31–36.
- Panday, P. K., & Chowdhury, S. (2020). Responsiveness of local government officials: insights and lessons from participatory planning and budgeting. *Asian Pacific Journal of Public Administration*, 42(2), 132–151.
- Pilcher, R. (2011). Implementing IFRS in local Government: Institutional Isomorphism as NPM goes mad? *Local Government Studies*, 37(4), 367–389.
- Piña, G., & Avellaneda, C. (2019). Central Government Strategies to Promote Local Governments' Transparency: Guidance or Enforcement? *Public Performance and Management Review*, 42(2), 357–382.
- Piña, G., & Avellaneda, C. N. (2018). Municipal isomorphism: testing the effects of vertical and horizontal collaboration. *Public Management Review*, 20(4), 445–468.
- Pintea, M.-O., & Achim, M.-V. (2010). Performance - an Evolving Concept. *Annals of University of Craiova - Economic Sciences Series*, 2(38).
- Pique, R. (2019). Higher pay, worse outcomes? The impact of mayoral wages on local government quality in Peru. *Journal of Public Economics*, 173, 1–20.
- Postula, M., Irodenko, O., & Dubel, P. (2020). Internal Audit as a Tool to Improve the Efficiency of Public Service. *European Research Studies Journal*, XXIII(Issue 3), 699–715.
- Power, M. (2015). How accounting begins: Object formation and the accretion of infrastructure. *Accounting, Organizations and Society*, 47, 43–55.
- Purcell, A. J., Francis, R. D., & Clark, C. (2014). Audit committee effectiveness in victorian local government. *Australian Accounting Review*, 24(4), 339–369.
- Rahman, A. (2022). Do Government Characteristics Affect E-Government Maturity. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 51–60.
- Ramasamy, R. (2020). Governance and administration in Sri Lanka: trends, tensions, and prospects. *Public Administration and Policy*, 23(2), 187–198.
- Rich, K. T., Roberts, B. L., Wall, J. M., & Zhang, J. X. (2021). Toward an understanding of year-over-year changes in municipal management discussion and analysis disclosures. *Advances in Accounting*, 54(October 2019), 100548.
- Rivenbark, W. C., Fasiello, R., & Adamo, S. (2019). Exploring Performance Management in Italian Local Government: The Necessity of Outcome Measures and Citizen Participation. *American Review of Public Administration*, 49(5), 545–553.
- Rodríguez-pose, A., & Tselios, V. (2019). Well-being , Political Decentralisation and Governance Quality in Europe Well-being , Political Decentralisation and Governance Quality in Europe. *Journal of Human Development and Capabilities*, 20(1), 69–93.
- Rosa, C. P., Morote, R. P., & Prowle, M. J. (2014). Developing performance audit in Spanish local government: an empirical study of a way forward. *Public Money and Management*, 34(3), 189–196.
- Rozario, A. M., & Issa, H. (2020). Risk-based data analytics in the government sector: A case study for a U.S. county. *Government Information Quarterly*, 37(2), 101457.
- Santolini, R. (2020). Spatial effects on local government efficiency. *Papers in Regional Science*, 99(1), 183–200.
- Sarkodie, S. A., & Adams, S. (2020). Electricity access, human development index, governance and income inequality in Sub-Saharan Africa. *Energy Reports*, 6, 455–466.
- Sarpong, S. Y., & Bein, M. A. (2021). Effects of good governance, sustainable development and aid on quality of life: Evidence from sub-saharan Africa. *African Development Review*, 33(1), 25–37.

- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research methods for business students - 5th ed.* Pearson Education Limited.
- Schwarz, L. A. D., & Dalmácio, F. Z. (2021). The relationship between economic policy uncertainty and corporate leverage: Evidence from Brazil. *Finance Research Letters*, 40(June 2020), 1–9.
- Scott, W. R. (1987). The Adolescence of Theory Institutional. *Administrative Science Quarterly*, 32(4), 493–511.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). *Research Methods for Business. A Skill - Building Approach* (Fifth Edit). Jhon Wiley and Sons Ltd.
- Sharfman, M. P., & Dean, J. W. (1991). Conceptualizing and Measuring the Organizational Environment: A Multidimensional Approach. *Journal of Management*, 17(4), 681–700.
- Shi, Z., & Tang, X. (2020). Exploring the New Era : An Empirical Analysis of China ' s Regional HDI Development Exploring the New Era : An Empirical Analysis of China ' s Regional HDI Development. *Emerging Markets Finance and Trade*, 9(00), 1–14.
- Shinohara, S. (2023). Bad government performance and citizens' perceptions: A quasi-experimental study of local fiscal crisis. *International Review of Administrative Sciences*, 89(3), 722–740.
- Sofyani, H., Akbar, R., & Ferrer, R. C. (2018). 20 years of performance measurement system (PMS) implementation in Indonesian local governments: Why is their performance still poor? *Asian Journal of Business and Accounting*, 11(1), 151–184.
- Sonnentag, S., & Frese, M. (2005). Performance Concepts and Performance Theory. *Psychological Management of Individual Performance*, January, 1–25.
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Ekonisia.
- Stanica, C. M., & Aristigueta, M. (2019). Progress toward New Public Governance in Romania. *International Journal of Public Leadership*, 15(3), 189–206.
- Starbuck, C. (2023). *The Fundamentals of People Analytics*.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS*. CV Andi Offset.
- Summermatter, L., & Siegel, J. P. (2009). Defining Performance in Public Management : Variations over time and space. *Defining Performance in Public Management: Variations Over Time and Space*, 34.
- Suprianto, E., & Salim, A. (2024). The effect of local government wealth on internet financial reporting (IFR) compliance with local geographic as a moderation variable : a new institutional theory approach. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–14.
- Sutaryo, Sahari, S. B., Jakpar, S. Bin, & Balia, S. S. bin. (2023). THE ROLE OF INTERNAL AUDITS ON THE PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION : EVIDENCE FROM INDONESIA. *Viešoji Politika Ir Administravimas.*, 22(4), 578–593.
- Suzuki, W. Y. N., Laurini, M. P., & Nakabashi, L. (2022). Spatial heterogeneities, institutions, and income: Evidence for Brazil. *Papers in Regional Science*, 101(3), 537–571.
- Talbot, C. (1999). Public performance - towards a new model? *Public Policy and Administration*, 14(3), 15–34.
- Tolbert, P. S., & Zucker, L. G. (1983). Institutional Sources of in the Formal Change Structure of Organizations: The Diffusion of Civil Service Reform. *Administrative Science Quarterly*, 28(1), 22–39.
- Tourinho, M., Santos, P. R., Pinto, F. T., & Camanho, A. S. (2022). Performance assessment of water services in Brazilian municipalities: An integrated view of efficiency and access. *Socio-Economic Planning Sciences*, 79(May), 101139.
- Tran, C. D. T. T., & Villano, R. A. (2019). Environmentally-adjusted efficiencies of Vietnamese higher education institutions: A multi-stage bootstrap DEA method. *International Journal of Operational Research*, 36(3), 413–439.
- Tran, C., Kortt, M., & Dollery, B. (2019). Population size or population density? An empirical examination of scale economies in South Australian local government, 2015/16. *Local Government Studies*, 45(5), 632–653.
- Tripathi, S. (2021). How does urbanization affect the human development index? A cross-country analysis. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 5(3), 1053–1080.
- Trommel, W. (2020). Good Governance as Reflexive Governance: In Praise of Good Collegueship. *Public Integrity*, 22(3), 227–235.
- Tsang, E. W. K. (2014). Generalizing from Research Findings : The Merits of Case Studies. *International Journal of Management Reviews*, 16, 369–383.

- Tulsyan, D. P., Joshipura, M., & Mishra, A. V. (2025). Does profitability explain the low-risk anomaly in India? *Quarterly Review of Economics and Finance*, 104(May), 1-11.
- Turetken, O., Jethifer, S., & Ozkan, B. (2020). Internal audit effectiveness: operationalization and influencing factors. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 238-271.
- Vadasi, C., Bekiaris, M., & Andrikopoulos, A. (2020). Corporate governance and internal audit: an institutional theory perspective. *Corporate Governance (Bingley)*, 20(1), 175-190.
- Valenty, Y. A., & Kusuma, H. (2019). Determinan kepatuhan pajak: perspektif theory of planned behavior dan teori institusional. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 1(2019), 47-56.
- Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2010). Performance management in the public sector. *Performance Management in the Public Sector*, May, 1-198.
- Vignieri, V. (2018). Performance Management in the Public Sector. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, 1-8.
- Villamejor-Mendoza, M. F. (2020). Competitive cities: implications for better public service. *Policy Design and Practice*, 3(4), 445-461.
- Vyasulu, V. (2015). 'Good' governance in India: How good or bad? *Millennial Asia*, 6(2), 111-127.
- Walker, R. M., & Andrews, R. (2015). Local government management and performance: A review of evidence. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 101-133.
- Walton, G. W. (2020). Good Governance, Corruption, and Papua New Guinea's Public Service. *The Palgrave Handbook of the Public Servant*, 1-19.
- Wang, X., & Chen, C. (2022). An empirical analysis of capital assets condition ratio in local governments: the case of Florida counties. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(2), 330-346.
- Wang, Z. (2010). Citizens' satisfaction with government performance in six asian-pacific giants. *Japanese Journal of Political Science*, 11(1), 51-75.
- Welch, E. W. (2012). The relationship between transparent and participative government: A study of local governments in the United States. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 93-115.
- White, S., Bailey, S., & Asenova, D. (2020). Blurred lines: exploring internal auditor involvement in the local authority risk management function. *Public Money and Management*, 40(2), 102-112.
- Wicaksono, A. K., & Sutaryo. (2017). Faktor Penentu Audit Report Lag Pemerintah Daerah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 209-228.
- Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*.
- Worthington, A., & Dollery, B. (2000). An Empirical Survey of Frontier Efficiency Measurement Techniques in Local Government. *Local Government Studies*, 26(2), 23-52.
- Yong, G., & Wenhao, C. (2012). Developing a City Governance Index: Based on Surveys in Five Major Chinese Cities. *Social Indicators Research*, 109(2), 305-316.
- Yumashev, A., Kondrashev, S., Mikhaylov, A., & Slusarczyk, B. (2020). Global Indicators of Sustainable Development: Evaluation of the Influence of the Human. *Energies*, 13.